



LAPORAN SINGKAT KOMISI VIII DPR RI
Bidang Kementerian Agama RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian
Pemberdayaan Perempuan & PA RI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: --
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Kamis, 17 September 2015
Waktu	: 14.00 – 17.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI (Ged.Nusantara II Lt. 2)
Rapat dengan	: Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dan Keselamatan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional
Acara	: Penguatan program pusat informasi konseling kesehatan remaja dan generasi berencana sebagai upaya perlindungan anak.
iKetua Rapat	: H. Abdul Malik Haramain M.Si
Sekretaris Rapat	: Yanto Supriyanto,SH
Hadir	: 11 Anggota dari 26 Anggota Panja Perlindungan Anak Komisi VIII DPR RI.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Perlindungan Anak Komisi VIII DPR RI, Kamis, 17 September 2015 dibuka pukul 14.00 WIB, rapat tersebut di pimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Bpk. **H. Abdul Malik Haramain M.Si**, rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Pimpinan Rapat menyampaikan agenda Rapat Dengar Pendapat Umum kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dan Keselamatan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional serta berbagai hal yang terkait

dengan Penguatan program pusat informasi konseling kesehatan remaja dan generasi berencana sebagai upaya perlindungan anak.

II. PEMBAHASAN

- I. Pendahuluan
- II. Paparan dari Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dan Keselamatan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional
- III. Penutup

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja perlindungan anak Komisi VIII DPR RI mengenai “Penguatan program pusat informasi konseling kesehatan remaja dan generasi berencana sebagai upaya perlindungan anak” dengan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dan Keselamatan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional maka dapat dicatat sebagai berikut:

1. Kepala BKKBN yang diwakili oleh Deputi bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga menyampaikan penjelasan antara lain:

a. Permasalahan remaja Indonesia yaitu :

- 1) Perilaku seks pada remaja, terdapat kecenderungan kenaikan proporsi remaja usia 15-24 tahun yang aktif secara seksual terutama laki-laki sebesar 5% dan perempuan 1% berdasarkan data SKRRI 2003 dan 2007.
- 2) Kehamilan dan kelahiran pada remaja
- 3) Perkawinan pada remaja
- 4) HIV dan AIDS, banyaknya remaja yang terpapar HIV/AIDS dan narkoba dari data kementerian kesehatan Rikumulatif dari tahun 1987 s/d september 2014 sebesar 55.799 kasus dan 3,1% kelompok usia 15-19 tahun.
- 5) Napza, data dari BNN tahun 2013 menunjukkan 22% dari 4 juta penduduk Indonesia penyalahgunaan narkoba dan sekitar 880 ribu penyalahgunaan napza adalah pelajar dan remaja/mahasiswa.

b. Rekomendasi solusi atas permasalahan remaja yakni: :

- 1) Melaksanakan amanat uu no.52 tahun 2009 tentang pembinaan kepada remaja, dengan mengembangkan program untuk remaja sebagai upaya untuk membantu mempersiapkan kehidupan berkeluarga dengan nama program generasi berencana (Genre)
- 2) Melakukan advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan bagi peningkatan kualitas penduduk Indonesia.

- 3) Melakukan pembentukan pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa (PIK R/M) yang tadinya masih pada tataran universitas dan SLTA dikembangkan sampai tingkat SLTP.
 - 4) Memperkuat kemitraan program Genre bekerja sama dengan instansi lain seperti kementerian kesehatan RI, TNI, BNN, Kemenpora, KPAN, BP4, Pramuka, organisasi internasional seperti UNICEF, UNFPA, Rutgers WPF serta lembaga swadaya masyarakat.
 - 5) Pembentukan pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) pada tingkat provinsi, kabupaten dan kota maupun kecamatan.
2. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam paparannya menyampaikan permasalahan pekerja anak masih signifikan di beragam sektor yaitu sektor pertanian 60%, jasa 26%, industri 7%, dan sektor lainnya 7%. Jenis bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA) diantaranya eksploitasi seksual untuk prostitusi, pekerja rumah tangga anak, penyelam mutiara, anak bekerja di pertambangan, pekerja anak di perkebunan, anak jalanan dll. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam paparannya memberikan masukan sebagai berikut :
- a. Pelembagaan gerakan nasional, pengarusutamaan dan penghapusan pekerja anak.
 - b. Mereview peraturan dan penegakan hukum kebijakan tentang pekerja anak dan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA), yang bertujuan tersusunnya kebijakan aksi langsung percepatan pencegahan dan penanggulangan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA).
 - c. Membuat kebijakan pendidikan dan pelatihan yang bertujuan penarikan pekerja anak dari dunia kerja ke dunia pendidikan.
 - d. Melakukan kebijakan perlindungan sosial dengan program yang menawarkan dan memberikan akses ke pelayanan sosial dan kesehatan serta penguatan peran dan fungsi keluarga dalam pencegahan pekerja anak.
 - e. Menyusun kebijakan pasar kerja dengan mendorong pasar tenaga kerja yang berfungsi dengan baik serta adanya akses ke pelatihan kejuruan dan melakukan pemantauan terhadap bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA).

Rapat ditutup pukul 17.30 WIB

Jakarta, 17 September 2015

AN.KETUA RAPAT/
SEKRETARIS,

ttd.

YANTO SUPRIYANTO
NIP. 196305241992031001